

BAB II

i. Asumsi Dasar Neo Liberalisme

Pada dasarnya neo-liberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neo-liberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar. Sehingga

¹ Martinez, Elizabeth & Arnoldo Garcia, What is “Neoliberalism”?, National Network for Immigrant and Refugees Rights, Januari, 1997

ii. Sejarah Munculnya Neo Liberalisme

Pendekatan neoliberalis yang merupakan “anak” dari pendekatan liberalis melihat isu – isu internasional dengan fokus kerja sama atau koperasi. Neo-liberalisme merupakan gagasan yang terkait dengan upaya untuk kembali pada kebijakan ekonomi liberal klasik yang diusung oleh Adam Smith dan David

³ Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.103-104

Dari pengertian di atas bisa diambil penjelasan bahwa *neoliberalisme* menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi, karena mereka yang mengikuti paham ini menganggap campur tangan negara pada akhirnya akan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta pasar dan membuatnya tidak efisien dan tidak sesuai kenyataan. Karenanya, liberalisasi dan privatisasi menjadi ciri penting dalam kebijakan neoliberalisme pada tingkat domestik.⁶

⁶ Apridar, *Ibid*, h.20

Neoliberalisme di lain sisi sangat percaya bahwa institusi dan rezim internasional akan berpengaruh signifikan dalam hubungan internasional. Mereka percaya bahwa dengan adanya derajat interdependensi yang tinggi, negara – negara akan sering membentuk institusi – institusi internasional untuk menghadapi masalah – masalah bersama. Kaum neoliberalis juga berpendapat bahwa institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan rezim internasional seperti rezim perdagangan melalui WTO akan dapat membantu memajukan kerjasama internasional sekaligus menjadi fasilitator hubungan antar negara.⁸

⁷ Apridar, *Ibid*, h. 24
⁸ Budi Winarno, *Globlalisasi dan Krisis Demokrasi*, (Yogyakarta: MedPress, 2007), h. 119
⁹ Apridar, *Ibid*, h.21

Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi, dan proses produksi dari Perusahaan-perusahaan Trans-nasional (*TNCs/ Trans National Corporations*) dengan dukungan Lembaga-lembaga Finansial Internasional (*IFIs/International Financial Institutions*) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (*WTO/World Trade Organization*). Globalisasi muncul bersamaan dengan fenomena runtuhnya kapitalisme Asia Timur. Era baru tersebut mencoba

¹⁰ Mansour Fakih, *Neoliberalisme dan Globalisasi*, Ekonomi Politik Digital Journal Al-Manar Edisi I/2004, h. 3

yat, serta persoalan keadilan sosial. Semen
 menghadapi krisis hutang dan krisis 'ov
 ahun 80-an, serta akibat dampak ne
 ng dulu dikumandangkan oleh *The Bret*
 pembangunan ekonomi 'pertumbuhan
 ainstream yang berakar pada paradigma d
 rnisasi. Namun di pihak lain muncul ge
 n organisasi non pemerintah (ornop) dan
 gkitnya masyarakat sipil (*civil society*)
 elah disinggung sebelumnya, sebelum k

yat, serta persoalan keadilan sosial. Semen
 menghadapi krisis hutang dan krisis 'ov
 ahun 80-an, serta akibat dampak ne
 ng dulu dikumandangkan oleh *The Bret*
 pembangunan ekonomi 'pertumbuhan
 ainstream yang berakar pada paradigma d
 rnisasi. Namun di pihak lain muncul ge
 n organisasi non pemerintah (ornop) dan
 gkitnya masyarakat sipil (*civil society*)
 elah disinggung sebelumnya, sebelum k

¹¹ Mansour Fakih, *Ibid*, h. 5

Secara lebih tegas yang dimaksud dengan globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas, yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme.¹³ Para teoretisi kritis sejak lama sudah meramalkan perkembangan kapitalisme akan berkembang menuju pada dominasi ekonomi, politik, dan budaya berskala global setelah perjalanan panjang melalui era kolonialisme. Jadi dengan demikian 'globalisasi' secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun, jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekonomi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoretis sebenarnya telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan, yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan' ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari *kolonialisme* dan *developmentalism* sebelumnya. Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta kalangan yang

¹³ Mansour Fakih, *Ibid*, h. 7

Pendukung anti globalisasi adalah pihak yang paling lantang menentang neoliberalisme, terutama sekali dalam implementasi "pembebasan arus modal" akan tetapi tidak dalam hal adanya pembebasan arus tenaga kerja. Salah satu pendapat mereka, kebijakan neoliberal hanya mendorong sebuah "perlombaan menuju dasar" dalam arus modal menuju titik terendah untuk standar lingkungan dan buruh.

¹⁵ Published by Indah Maisuri on Juny 9, 2013, <http://www.scribd.com/doc/148660375/3024-2929-1-PB-pdf>, diakses pada tanggal 10 maret 2015 pukul: 17.10

i. Asumsi Dasar Perjanjian AFTA

Justifikasi secara teoritis untuk perdagangan bebas berasal dari karya ekonom David Ricardo seabad yang lalu yang menyebutkan bahwa perdagangan bebas adalah menguntungkan dengan berlandaskan pada gagasan keunggulan komperatif, yang menyatakan bahwa meskipun sebuah negara sanggup menghasilkan semua barang pada harga – harga yang lebih rendah dari negara lain, perdagangan masih tetap menguntungkan kedua negara tersebut berdasarkan biaya komperatif. Perusahaan – perusahaan multinasional menggunakan peluang perdagangan bebas untuk menjadi produsen barang yang paling murah. Pencarian keunggulan absolut ini membuat tingkat upah tetap berada dibawah, membawa

¹⁷ Henry Simamora, *Managemen Pemasaran Internasional*, (Jakarta; Salemba Empat, 2000), h. 23

ii. Sejarah ASEAN Free Trade Area (AFTA)

Pada pertemuan tingkat Kepala Negara ASEAN (*ASEAN Summit*) ke-4 di Singapura pada tahun 1992, para kepala negara mengumumkan pembentukan suatu kawasan perdagangan bebas di ASEAN (AFTA) dalam jangka waktu 15 tahun.

¹⁸ Henry Simamora, *Ibid*, h.37

[illegible]

iii. Manfaat Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) bagi Indonesia

1. Peluang pasar yang semakin besar dan luas bagi produk Indonesia, dengan penduduk sebesar $\pm$ 500 juta dan tingkat pendapatan masyarakat yang beragam;
2. Biaya produksi yang semakin rendah dan pasti bagi pengusaha/produsen Indonesia yang sebelumnya membutuhkan barang modal dan bahan baku/penolong dari negara anggota ASEAN lainnya dan termasuk biaya pemasaran;
3. Pilihan konsumen atas jenis/ragam produk yang tersedia di pasar domestik semakin banyak dengan tingkat harga dan mutu tertentu;
4. Kerjasama dalam menjalankan bisnis semakin terbuka dengan beraliansi dengan pelaku bisnis di negara anggota ASEAN lainnya.

[illegible]

C. Teori Kritis

²¹ Jill Steans & Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspectives and Themes* (London: Pearson Education, 2001), hlm 101.

Hubungan erat antara teori atau gagasan dengan praktik sosial yang aktual merupakan persoalan penting dalam pandangan teori kritis. Hal ini terjadi karena adanya sebuah kontradiksi antara gagasan dominan mengenai sifat dasar sistem sosial dan ekonomi dengan kondisi aktual atau material kehidupan manusia. Dalam sudut pandang kelas kapitalis, liberalisme benar-benar dapat menggambarkan realitas kehidupan mereka. Namun demikian, bagi kelas pekerja yang termiskinkan, realitas kehidupan sehari-hari mereka sangat berbeda, di mana mereka lebih suka menggunakan istilah opresif, atau eksploitatif dan melihat diri mereka hanya memiliki sedikit pilihan dan kesempatan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, liberalisme tidak memberikan gambaran mengenai sebuah kebenaran akan sifat dasar manusia dan masyarakat, gagasan ini hanya merefleksikan sudut pandang dari kelas yang dominan.²³

²² Dodi Mantra, *Hegemoni & Diskursus Neoliberalisme*, (Bekasi: Mantra Press, 2011) h.16

[illegible]

Dengan demikian, pendekatan teori kritis memandang bahwa gagasan mengenai integrasi ekonomi kawasan berlandaskan pada liberalisme tidak terlepas dari kepentingan kelompok – kelompok sosial dan ekonomi tertentu, terutama kelas pemilik modal. Sementara peranan pemerintah memainkan fungsi tertentu untuk mendukung keberadaan sistem kapitalis di tingkat kawasan. Beragam upaya liberalisasi ekonomi yang digalang pemerintah Indonesia di tingkat ASEAN dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk melestarikan eksistensi kapitalisme regional. Dan minimnya persiapan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi integrasi ekonomi regional dipengaruhi oleh gagasan liberalisme yang diyakini merupakan gambaran dari realitas atau kebenaran akan keadaan sosial dan ekonomi, sehingga muncul optimisme di kalangan pemerintah akan kesiapan ekonomi Indonesia dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015.

[illegible]

pemikiran dan perkataan

pemikiran dan perkataan

pemikiran dan perkataan

Berdasarkan konsep Gramsci ini, Richard Peet kemudian memindahkan analisis mengenai kebijakan ekonomi dari level ideologis (produksi sosio-politik mengenai apa yang dipikirkan manusia) ke level hegemoni (produksi sosio-kultural mengenai cara manusia berpikir). Wilayah kebijakan terkait erat dengan sistem produksi pemikiran ekonomi ‘yang baik’ yang terformalisasi secara partikular. Ini merupakan sebuah area produksi kultural-politik yang dihuni oleh individu yang berpengalaman dan terlatih (para ahli) dan institusi yang mapan dan ditopang oleh pendanaan dalam jumlah besar, departemen pemerintah, *think tank*, lembaga-lembaga yang ditopang keamanan finansial dan sejenisnya.²⁷

²⁶ Antonio Gramsci, *Selection from the Prison Notebooks*, (New York: International Publisher, 1971), h. 412-413

²⁷ Richard Peet, *Unholy Trinity*, h.16.

²⁸ Michel Foucault, *The Archaeology of Knowledge*, (New York: Harper and Row, 1972).

Ketika klaim atas rasionalitas itu telah diterima secara luas, dan ketika sekelompok ahli dianggap membicarakan kebenaran, diskusi selanjutnya akan terbatas pada topik ekonomi dalam cakupan yang sempit, berpikir dengan sekumpulan teori yang telah ditentukan, menggunakan sekumpulan istilah yang ditentukan. Di dalam sistem pemikiran yang sempit ini, analisis formal menggunakan sebuah kode intelektual yang memperinci kategori-kategori dan istilah-istilah yang disetujui. Secara sederhana menggunakan istilah-istilah ini membatasi apa yang dapat dipikirkan, dikatakan dan dibayangkan. Karenanya, kedalaman dari sebuah hegemoni terletak di dalam kemampuan dari sebuah formasi diskursif untuk memperinci parameter praktis, realistis dan masuk akal di antara sekelompok teorisi, praktisi politik dan pembuat kebijakan.³⁰

²⁹ Richard Peet, *Unholy Trinity*, h.16.

[illegible]

Keadaan inilah yang sangat sering dihadapi negara berkembang ketika berhadapan dengan kondisionalitas yang diajukan IMF, dengan kondisi di mana tidak terdapat alternatif lain, sehingga tidak dapat terhindarkan. Dan ketika berhadapan dengan kegagalan dari kebijakan kondisionalitas tersebut, maka kondisi yang mendominasi adalah optimalitas, bahwa apa yang telah dilaksanakan adalah yang terbaik dan maksimal. Keberhasilan dari hegemoni ini terletak pada strategi untuk mengkonversikan politik, yang merepresentasikan kepentingan kelas tertentu, dan terdiri dari sekumpulan opini esensial, ke dalam sebuah praktikalitas yang berasal dari teori dan yang tampak mengekspresikan kebaikan bersama ketimbang kepentingan sepihak.³²

³¹ Richard Peet, *Unholy Trinity*, h.17

³² Richard Peet, *Unholy Trinity*, h.18

a lebih matang dalam sektor-sektor yang sa
erintah Indonesia akan ideologi neoliberalisme m
oni yang melahirkan praktik-praktik kebijakan y
titas pasar, sehingga pemerintah tidak merasa per
strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, d
asi daya saing ekonomi akan berkembang deng
me pasar yang bekerja tanpa terlihat. Hegemoni
erada di balik langkah pemerintah Indonesia menuj
omi ASEAN.

a lebih matang dalam sektor-sektor yang sa
erintah Indonesia akan ideologi neoliberalisme m
oni yang melahirkan praktik-praktik kebijakan y
titas pasar, sehingga pemerintah tidak merasa per
strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, d
asi daya saing ekonomi akan berkembang deng
me pasar yang bekerja tanpa terlihat. Hegemoni
erada di balik langkah pemerintah Indonesia menuj
omi ASEAN.

gah Kecil & Mikro (UMKM)

ian Usaha Kecil Menengah

a lebih matang dalam sektor-sektor yang sa
erintah Indonesia akan ideologi neoliberalisme m
oni yang melahirkan praktik-praktik kebijakan y
titas pasar, sehingga pemerintah tidak merasa per
strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, d
asi daya saing ekonomi akan berkembang deng
me pasar yang bekerja tanpa terlihat. Hegemoni
erada di balik langkah pemerintah Indonesia menuj
omi ASEAN.

gah Kecil & Mikro (UMKM)

ian Usaha Kecil Menengah

a lebih matang dalam sektor-sektor yang sa
erintah Indonesia akan ideologi neoliberalisme m
oni yang melahirkan praktik-praktik kebijakan y
titas pasar, sehingga pemerintah tidak merasa per
strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, d
asi daya saing ekonomi akan berkembang deng
me pasar yang bekerja tanpa terlihat. Hegemoni
erada di balik langkah pemerintah Indonesia menuj
omi ASEAN.

gah Kecil & Mikro (UMKM)

ian Usaha Kecil Menengah

Menurut Rahmana³³, bebrapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada UKM , diantaranya adalah Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

³³ Arief Rahmana, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Informasi terdepan tentang Usaha Kecil Menengah, <http://infoukm.wordpress.com>, diakses pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 11:26

Pada saat yang sama, MEA akan mengatasi kesenjangan pembangunan dan mempercepat integrasi terhadap Negara Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam melalui *Initiative for ASEAN Integration* dan inisiatif regional lainnya. Bentuk Kerjasamanya adalah :

- ³⁶ Kompas, *Tinjauan Kompas, Menatap Indonesia 2015, Antara Harapan dan Tantangan*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hlm. 78
- ³⁷ Julius Latumaerissa, *Ibid*, h.536

- perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk memperkuat hubungan secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, pilar utama pembangunan ekonomi dan basis produksi tunggal yang kompetitif dan pembangunan ekonomi yang merata terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dengan memasukkan unsur-unsur yang saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang masing-masing pilar dan harus memastikan konsistensi unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling terkait antara para pemangku kepentingan yang relevan.

perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk memperkuat perekonomian secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, pilar utama pembangunan ekonomi adalah basis produksi tunggal dan ekonomi yang kompetitif, pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dengan memasukkan unsur-unsur yang saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang masing-masing pilar dan harus memastikan konsistensi unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan salib antara para pemangku kepentingan yang relevan.

- perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk memperkuat hubungan secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, pilar utama pembangunan ekonomi dan basis produksi tunggal yang kompetitif dan pembangunan ekonomi yang merata terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dengan memasukkan unsur-unsur yang saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang masing-masing pilar dan harus memastikan konsistensi unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling terkait antara para pemangku kepentingan yang relevan.

perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk memperkuat hubungan secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, pilar utama pembangunan ekonomi dan basis produksi tunggal yang kompetitif dan pembangunan ekonomi yang merata terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dengan memasukkan unsur-unsur yang saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang masing-masing pilar dan harus memastikan konsistensi unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling terkait antara para pemangku kepentingan yang relevan.

perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk memperkuat hubungan secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, pilar utama pembangunan ekonomi dan basis produksi tunggal yang kompetitif dan pembangunan ekonomi yang merata terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dengan memasukkan unsur-unsur yang saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang masing-masing pilar dan harus memastikan konsistensi unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling terkait antara para pemangku kepentingan yang relevan.

perdagangan eksternal terhadap ASEAN dan kebutuhan untuk memperkuat hubungan secara keseluruhan untuk tetap melihat ke depan, pilar utama pembangunan ekonomi dan basis produksi tunggal yang kompetitif dan pembangunan ekonomi yang merata terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Dengan memasukkan unsur-unsur yang saling berkaitan kuat. Dengan Memasukkan unsur-unsur yang masing-masing pilar dan harus memastikan konsistensi unsur-unsur serta pelaksanaannya yang tepat dan saling terkait antara para pemangku kepentingan yang relevan.

MEA bertujuan untuk membangun kemitraan untuk kemajuan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan warga ASEAN dengan tercapainya integrasi regional yang melalui upaya kolektif masyarakat ASEAN. Realisasi MEA pada tahun 2015 akan membuka peluang lebih besar bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Diantara manfaat diberlakukannya MEA adalah:

- Pilihan barang dan jasa yang lebih besar bagi konsumen melalui peningkatan perdagangan intra-regional;
- Skala ekonomi yang lebih besar bagi dunia usaha dan industri, yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi, sehingga menghasilkan harga barang yang lebih kompetitif;
- Penurunan biaya produksi berdampak positif terhadap konsumen karena harga barang dan jasa menjadi lebih rendah;
- Permintaan yang lebih besar untuk barang dan jasa akan menciptakan lapangan kerja di berbagai industri seperti manufaktur, transportasi, logistik dan komunikasi;
- Peningkatan perdagangan dan investasi akan mendorong kewirausahaan dan inovasi yang lebih baik di bidang produk dan jasa, sehingga mampu

³⁸ Sri Hartati Samhadi, *Indonesia dan Globalisasi, dalam Tinjauan Kompas, Menatap Indonesia 2014, Tantangan, Prospek Politik dan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2014), h.70

- Peningkatan integrasi ekonomi akan memperkuat jaringan bisnis di ASEAN, membangun pertumbuhan dan kemakmuran;
- Tingkat penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi di ASEAN akan memberikan kontribusi dalam membangun kelas menengah yang lebih besar di kawasan, sehingga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Hal ini akan menghasilkan stabilitas sosial melalui penguatan pasar dan daya beli barang dan jasa konsumen.³⁹

[illegible]